

**ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI SALAH
SATU UPAYA Mendukung PENGENDALIAN INTERN KREDIT
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota)**

Dita Oktaviana Dyastuti
Achmad Husaini
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email : dita.octs@yahoo.com

Abstract

The provision of credit can help entrepreneurs who need of funds, good investment fund working capital an funds for. A bank that meet services public services to large business, medium or small business one of them is PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota. Carefulness in analysis is needed in assessing credit the correct procedure, hence needed internal control procedures in order to minimize for deviation which does not work. The procedure of this study is to examine the implementation of the provision of credit system working capital and knoe the provision of credit system working capital credit in support of internal control. Focus in this research is a system the provision of credit working capital and audits of internal control over the provision of credit system working capital. The results of research at the time of the system implementation credit provision the bank carried out by employees each part already have a clear description of the responsibility and authority, describing a good performance in his work. However in an activity control, the implementation of the provision of credit accumulation of duty there were still on the function account officer in performing credit analysis debtor against a candidate.

Keywords : Deviation Procedure, Credit Analysis, Account Officer

Abstrak

Pemberian kredit dapat membantu pengusaha yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Bank yang memenuhi jasa pelayanan bagi masyarakat baik pengusaha besar, menengah ataupun pengusaha kecil salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota. Ketelitian dalam menganalisa kredit sangat dibutuhkan dalam menilai prosedur yang benar, oleh karena itu dibutuhkan penegndalian intern agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedur yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemberian kredit modal kerja dan mengetahui sistem pemberian kredit modal kerja dalam mendukung pengendalian intern kredit. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem pemberian kredit modal kerja dan pengendalian intern atas sistem pemberian kredit modal kerja. Hasil penelitian pada saat pelaksanaan sistem pemberian kredit pihak bank yang dilakukan oleh karyawan masing-masing bagian sudah mempunyai uraian tugas dan wewenang yang jelas, menggambarkan kinerja yang baik dalam bidangnya. Akan tetapi dalam aktivitas pengendalian, pelaksanaan pemberian kredit masih terdapat penumpukan tugas pada fungsi *account officer* dalam melakukan analisa kredit terhadap calon debitor.

Kata Kunci : Penyimpangan Prosedur, Analisa Kredit, Account Officer

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang tumbuh pesat, mengakibatkan persaingan antara perusahaan semakin ketat. Masing-masing perusahaan akan mencoba berbagai kebijakan dan strategi agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Strategi sangat dibutuhkan, namun untuk menjalankan strategi membutuhkan modal yang tidak sedikit. Berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal ini, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam pada pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti lembaga keuangan (perbankan).

Pemberian kredit dapat membantu pengusaha yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Kesempatan dapat diberikan kepada para pengusaha atau pihak lain yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk kredit, dengan harapan dapat memberikan manfaat baik bagi pengusaha maupun bagi pihak bank.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam, sehingga dengan adanya kredit maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan dengan adanya bunga (Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998).

Bank selaku kreditur harus selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh debitor dalam pemberian kredit modal kerja. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan, untuk itu kredit yang diberikan harus disesuaikan dengan jumlah modal kerja yang sesungguhnya dibutuhkan oleh debitor dengan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemberian kredit tersebut dilakukan analisis kredit untuk melihat atau menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha, cara mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha, maka pihak bank harus melakukan penilaian berdasarkan syarat-syarat teknis bank yang dikenal dengan 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, dan*

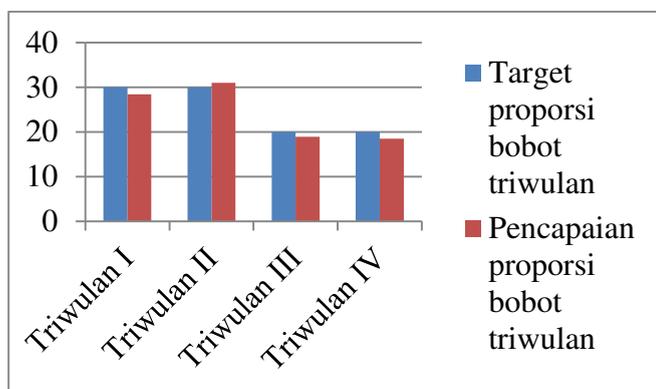
condition of economic. Selain itu juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan pemberian kredit yaitu dengan menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai, yang meliputi aspek manajemen, pemasaran, teknis, keuangan, hukum, ekonomi/sosial, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bank yang memenuhi jasa pelayanan bagi masyarakat baik pengusaha besar, menengah, ataupun pengusaha kecil salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota. Salah satu wujud pelayanan perbankan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota adalah pemberian kredit modal kerja yang merupakan fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan. Kredit ini disertai dengan suku bunga ringan dan bersaing yang dapat digunakan oleh para pengusaha sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota sebagai pemberi kredit, selain memperoleh keuntungan dari pemberian kredit tersebut juga mengalami sistem pengendalian intern yang kurang efektif dalam pelaksanaannya. Setiap triwulan sekali diadakan pengawasan Kantor Inspeksi (KANINS) BRI yang bertugas untuk melakukan penilaian dalam satu kantor unit secara keseluruhan dan bertugas agar setiap lini di BRI bekerja sesuai Standart Operasional Pelayanan (SOP) BRI. Apabila KANINS menemukan hal yang tidak sesuai dengan SOP, maka hal itu akan menjadi temuan KANINS, yang selanjutnya harus diselesaikan atau diperbaiki oleh kantor unit terkait. Bahan temuan ini akan mempengaruhi nilai kinerja. Kategori temuan KANINS berupa :

1. *Non Fraud*
Non Fraud adalah temuan yang tidak akan menyebabkan kerugian secara *financial* langsung terhadap BRI.
2. *Moderate*
Moderate adalah temuan yang bersifat akan menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama.
3. *Fraud*
Fraud adalah temuan kredit fiktif.
4. *Fraud* (Surat Peringatan)

Berikut ini adalah diagram mengenai adanya temuan KANINS pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota.



Gambar 1. Diagram Pertumbuhan Triwulan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa temuan KANINS yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota mengalami fluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengendalian kredit yang telah diterapkan oleh pihak bank masih tergolong kurang baik.

Melihat pentingnya sistem pemberian kredit maka peneliti tertarik untuk menganalisis sistem pemberian kredit modal kerja sebagai salah satu upaya mendukung pengendalian intern kredit. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemberian kredit modal kerja dan mengetahui sistem pemberian kredit modal kerja dalam mendukung pengendalian intern kredit.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem

Para ahli memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai sistem, namun demikian berbagai definisi tersebut memiliki inti atau tujuan yang sama. Sistem yaitu kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Hall, 2007:6). Sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5).

Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005: 2). Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi agar dapat mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output (Widjajanto, 2001:2). Dari beberapa definisi sistem

dapat disimpulkan bahwa sistem adalah jaringan prosedur atau rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat subsistem atau sumberdaya yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Pengendalian Intern

Pengendalian intern (*internal control*) merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Romney, 2004: 229). Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan agar dapat mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi (Widjajanto, 2001:2).

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, beserta prosedur dan metode yang digunakan untuk menjaga aset dan membantu mendorong untuk tercapainya kebijakan manajemen.

C. Perbankan

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”(Kasmir, 2012:12). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

D. Kredit Perbankan

Pasal 1 ayat 11 undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, menjelaskan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang kewajibannya pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu *credere* yang berarti percaya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan bank, maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitor), karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Supramono, 2009:152).

E. Pengendalian Intern Kredit

“Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak” (Hasibuan, 2008:105). Pengendalian kredit adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar (Suyatno, 2003:28).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan :

1. Sistem pemberian kredit modal kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota.
2. Pengendalian intern atas sistem pemberian kredit modal kerja yang diterapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota.

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota yang beralamatkan di Jalan Amin Jakfar No.31 Pamekasan. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis sistem pemberian kredit modal kerja.
2. Menganalisis pengendalian intern pada sistem pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja

Penelitian sistem pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota yang sudah dilakukan masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan agar pengendalian intern dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Pada saat permohonan kredit
Sistem prosedur pada saat permohonan kredit sudah berjalan cukup baik, akan tetapi sebaiknya setelah *customer service* menerima berkas kredit diserahkan terlebih dahulu kepada *account officer*, kemudian *account officer* memeriksa kembali berkas tersebut dan diberikan kepada Ka. Unit. Sebaiknya juga diberikan formulir yang berupa lembar *checklist* untuk mempermudah nasabah dalam melengkapi berkas-berkas pengajuan kredit dan *customer service* dalam pengecekan berkas-berkas pengajuan kredit tersebut.
2. Pada saat analisis kredit
Account officer menerima dan memeriksa kembali perlengkapan persyaratan pengajuan kredit, kemudian melakukan peninjauan di tempat usaha debitor (*On the spot*) dan menilai agunan nasabah. Setelah dilakukannya *On the spot*, maka *account officer* akan membuat laporan pada Lembar Kunjungan Nasabah (LKN). Sistem prosedur pada analisis kredit sudah berjalan cukup baik, akan tetapi sebaiknya pada penilaian agunan dilakukan oleh *supervisor*.
3. Pada saat putusan kredit
Ka. Unit membuat formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima. Sesuai dengan putusan Ka.

Unit apabila kredit yang diajukan ditolak maka *customer service* akan membuat surat penolakan kredit dengan disertai alasan penolakan. Sistem prosedur pada saat putusan kredit sudah berjalan dengan baik.

4. Pada saat penarikan kredit

Sistem prosedur pada saat penarikan kredit sudah berjalan cukup baik, sebaiknya setelah proses pengesahan selesai, *customer service* mengarahkan nasabah menemui Ka. Unit untuk melakukan pembinaan.

5. Pada saat pengawasan

Melakukan *monitoring* rekening nasabah yang bersangkutan dan memantau perkembangan debitor dalam pembayaran angsuran kredit dan bunganya tiap bulannya. Pihak bank mengingatkan apabila pada saat jatuh tempo uang yang berada pada rekening nasabah secara otomatis akan terpotong guna untuk membayar tagihan angsuran. Sistem prosedur pada saat pengawasan (*monitoring*) kredit sudah berjalan dengan baik.

B. Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja

1. Pada Saat Proses Permohonan Kredit

a. Personel kompeten dan dapat dipercaya
Dalam hal ini pengendalian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Pamekasan Kota yang ditinjau dari segi personelnya telah mendukung pengendalian intern yang baik.

b. Pemisahan tugas yang memadai
Sebaiknya tugas dari *account officer* hanya menganalisis kredit, sedangkan pemeriksaan agunan dilakukan oleh *supervisor*. Dimana salah satu tugas *supervisor* adalah melakukan kegiatan verifikasi, sehingga sangat memungkinkan dalam pemeriksaan agunan dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian intern kredit belum terlaksana dengan baik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota, karena belum adanya pemisahan tugas yang jelas sebagaimana mestinya.

c. Prosedur otorisasi yang tepat
Proses permohonan kredit telah mendukung pengendalian intern yang baik karena terdapat prosedur otorisasi yang tepat pada saat permohonan kredit.

d. Dokumen dan catatan yang memadai
Pengendalian intern pada saat permohonan kredit ditinjau dari dokumen dan catatan berjalan cukup baik. Sebaiknya pada lembar formulir permohonan pinjam diberi keterangan tulisan berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP).

e. Kontrol fisik aktiva dan catatan
Pengendalian intern atas control fisik aktiva dan catatan pada saat permohonan kredit sudah mendukung dengan baik.

2. Pada Saat Analisis Kredit

a. Personel kompeten dan dapat dipercaya
Pengendalian intern kredit yang ditinjau dari segi personelnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota telah mendukung pengendalian intern dengan baik.

b. Pemisahan tugas yang memadai
Pengendalian intern pada proses ini telah berjalan baik dengan adanya pemisahan tugas.

c. Prosedur otorisasi yang tepat
Pengendalian intern telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

d. Dokumen dan catatan yang memadai
Pengendalian intern kredit yang ditinjau dari segi dokumen dan catatan telah berjalan dengan baik.

e. Kontrol fisik aktiva dan catatan
Account officer selaku pejabat pemrakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota telah melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan *on the spot*. Sehingga pengendalian intern yang dilakukan berjalan dengan baik.

3. Pada Saat Penarikan Kredit

a. Personel kompeten dan dapat dipercaya
Pengendalian intern yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota telah berjalan dengan baik.

b. Pemisahan tugas yang memadai
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota pengendalian intern saat penarikan kredit sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemisahan tugas.

c. Prosedur otorisasi yang tepat
Pada saat penarikan kredit harus melalui *customer service*, Ka. Unit dan *teller* yang telah berkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern pada saat prosedur otorisasi berjalan dengan baik.

d. Dokumen dan catatan yang memadai
Sebelum dilakukannya realisasi kredit, *customer service* telah mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan perjanjian kredit dan kelengkapan atas agunan/jaminan. Pengendalian intern dokumen dan catatan berjalan dengan baik pada saat proses penarikan kredit.

e. Kontrol fisik aktiva dan catatan
Semua dokumen milik nasabah tersimpan di tempat yang aman. Pengendalian intern saat penarikan kredit yang terjadi telah mendukung pengendalian intern yang baik.

4. Pada Saat Pengawasan Kredit

a. Personel kompeten dan dapat dipercaya
Kegiatan ini dilakukan oleh *account officer* yang telah mempunyai kemampuan menguraikan secara jelas kekuatan dan kelemahan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar kembali kreditnya baik dengan dana yang berasal dari hasil usaha yang dibiayai maupun, dari sisi agunan kreditnya, sehingga dalam hal ini telah mendukung pengendalian intern yang baik.

b. Pemisahan tugas yang memadai
Adanya pemisahan tugas tersebut dalam hal ini *customer service* dapat mengelola kredit nasabah dengan baik dan dapat menginformasikannya kepada *account officer*. Pengendalian intern yang terjadi telah menunjukkan pengendalian intern yang baik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Unit Pamekasan Kota.

c. Prosedur otorisasi yang tepat
Proses pengawasan ini menunjukkan bahwa pengendalian intern yang terjadi berjalan dengan baik karena prosedur otorisasi telah dilaksanakan oleh petugas BRI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan buku pedoman pelaksanaan kredit yang telah disahkan oleh Direksi Bank.

d. Dokumen dan catatan yang memadai
Petugas kredit melakukan *review* file-file kredit setiap 6 bulan sekali. Sebaiknya petugas kredit juga mencatat tanggal penerusan kredit dalam register permohonan kredit. Pengendalian intern atas dokumen dan catatan pada saat pengawasan kredit berjalan cukup baik.

e. Kontrol fisik aktiva dan catatan
Apabila *on the spot* dilakukan secara rutin, maka petugas bank dapat mengetahui mana nasabah yang telat melakukan pembayaran

angsuran kredit. Hal ini menandakan pengendalian intern belum berjalan dengan baik.

5. Pemeriksaan Pekerjaan Secara *Independen*
Adanya kelemahan dari pengendalian intern disini adalah tidak adanya pemeriksaan mendadak (*surprise audit*), dengan adanya pemeriksaan mendadak diharapkan seluruh karyawan pada bagian masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya dan nantinya apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, setiap karyawan sudah siap. Pengendalian intern pada saat pemeriksaan pekerjaan secara independen kurang berjalan dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada saat pelaksanaan sistem pemberian kredit pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pamekasan Kota yang dilakukan oleh karyawan masing - masing bagian sudah mempunyai uraian tugas dan wewenang yang jelas, menggambarkan kinerja yang baik dalam bidangnya, sehingga dapat terlaksana jasa pelayanan yang baik pula. Akan tetapi, dalam aktivitas pengendalian, pelaksanaan pemberian kredit masih terdapat penumpukan tugas pada fungsi *account officer* dalam melakukan analisa kredit terhadap calon debitur.
2. Pengendalian intern kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Pamekasan Kota telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat pengendalian yang kurang dalam dokumen dan catatan yang memadai pada saat pengawasan kredit yaitu kurangnya dilakukan *review* file-file kredit yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi pada *account officer* dari fungsi analisis kredit (*credit analyst*) dan fungsi penilai jaminan (*appraisal*) sehingga penilaian kredit yang dilakukan bersifat lebih obyektif. Pemisahan fungsi ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan. Petugas Bank juga harus memperhatikan analisis terhadap

prospek usaha nasabah, karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk bisa melunasi kredit yang dipinjamnya kepada Bank.

2. Sebaiknya dalam pengendalian intern kredit dilakukan pengawasan dokumen atau file-file secara rutin dan petugas kredit juga harus mencatat tanggal penerusan kredit dalam register permohonan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Hall, James. 2007. *Accounting Information Systems*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Permada Media.

Jogiyanto, Hartono. 2005. *Analisis dan Sitem Informasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: ANDI.

Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-3. Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Romney, Marshall dan Steinbart, Paul John. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Suyatno, Thomas dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.